

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH GERAKAN
MAKASSAR GEMAR MEMBACA DI SDN TANGGUL
PATOMPO 1 DAN 2 DI KECAMATAN MAMAJANG KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

ST. HAWAH

Nomor Stambuk : 105640 199214



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PENGAJUAN

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH GERAKAN GEMAR
MEMBACA DI SDN TANGGUL PATOMPO 1 DAN 2 DI KECAMATAN
MAMAJANG
KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi persyaratan guna

Memperoleh Gelar

Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

ST. HAWAH

Nomor Stambuk : 105640 199214

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca Di SDN Tanggul Patompo 1 Dan 2 Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar”
Nama Mahasiswa : St. Hawah
Nomor Stambuk : 105640199214
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nuryanti Mustari., S.IP, M.Si


Handam, S.IP., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari., S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 037/FSP/A.3-VIII/VI/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu Tanggal 26 Bulan Juni Tahun 2019

TIM PENILAI





Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.sos., M.Si

Penguji :

1. Abdul Kadir Adys, SH., MM (Ketua) ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si ()
3. M. Amin Umar, S.Ag., M..PD.I ()
4. A Luhur Prianto, S.IP., M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : St. Hawah
Nomor Stambuk : 105640199214
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Juni 2019

Yang Menyatakan,

St. Hawah

Abstrak

Artikel ini membahas tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi tentang implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar. Melalui kegiatan lomba membaca dan kegiatan wisata berbasis edukasi dapat meningkatkan keinginan pelajar dalam gemar membaca. Kedua melalui program perpustakaan keliling yang mendatangi langsung sasaran kebijakan dapat meningkatkan minat baca pelajar. Ketiga kegiatan dongeng keliling yang bersamaan dengan perpustakaan keliling terbukti mampu meningkatkan minat baca para pelajar. Kemudian faktor yang mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan peningkatan minat baca pelajar melalui koordinasi antar lembaga yang baik dan respon positive dari para pelajar. Terakhir faktor penghambat adalah kekurangan SDM yang mengisi beberapa sektor dan kekurangan mobil operasional sehingga program dongeng keliling tidak maksimal.

Kata Kunci : Implementasi; Kebijakan; Peningkatan Minat Baca.

KATA PENGANTAR



“ Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ”

Segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan magfirah-Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar” dapat di selesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (SI) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si sebagai pembimbing I dan Handam, S.IP., M.Si sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan Kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do’a semoga Allah tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Rahman Rahim M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membina Jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si sebagai pembimbing I, yang telah membimbing penulis dan sekaligus memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Handam, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sampai rampungnya Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
7. Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Kepala SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Kepada Orang Tua Tercinta Bapak H. Muh. Yusuf, Ibu Hj. Aisyah, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam

penyelesaian studi. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak henti – hentinya untuk penulis.

9. Untuk Kakak-kakak dan adik saya serta Keluarga saya yang telah membantu saya berupa moral serta moril.
10. Untuk sahabat-sahabat tercinta dan seperjuanganku Masriana, Rofidah, S.IP, Dewi Sagita, S.IP , Raihanah Indah Kusuma, S.IP, Lisa Anjarsari, S.IP yang telah memberikan bantuan tenaga, masukan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya yang selalu mendampingi saya selama proses penelitian. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan dukungan yang selama ini diberikan untuk mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman 2014 program Studi Ilmu Pemerintahan terima kasih karena sudah menjadi keluarga selama mengikuti perkuliahan, memberi kenangan yang indah dan selalu saling memberi dukungan kepada sesama, terkhusus untuk kelas D, Gembel elit squad.
12. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, namun telah membantu dalam penyelesaian studi. Semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisinya.

Akhirul kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah Ilmu Pengetahuan tertama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Makassar, Juni, 2019

Penulis

ST. HAWAH



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	x
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Kebijakan	7
B. Konsep Kebijakan Publik.....	11
C. Konsep Implementasi Kebijakan	13
D. Kebijakan Pemerintah Daerah.....	20
E. Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Minat Baca	23
F. Kerangka Pikir	27
G. Fokus Penelitian.....	28
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisa Data.....	33
G. Pengabsahan Data	34

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	36
B. Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca Di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar	45
C. Faktor Yang Melatarbelakangi PelaksanaanProgram Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca Di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.....	67

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membaca pada era globalisasi informasi ini merupakan suatu keharusan yang mendasar untuk membentuk perilaku seorang pelajar. Dengan membaca seseorang dapat menambah informasi dan memperluas ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Tetapi tanpa adanya minat, pelajar tidak akan tertarik untuk membaca. Minat membaca merupakan faktor yang sangat penting yang ada dalam diri manusia, meskipun motivasinya sangat kuat, tetapi jika minat tidak ada tentu kita tidak akan melakukan sesuatu yang dimotivasi pada kita, minat membaca ini dapat tumbuh secara spontan dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh pihak luar, Sutini (2010).

Hal ini dengan Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Hal ini berarti pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam memberikan layanan pendidikan bagi pelajar.

Berdasarkan studi Pemetaan Minat Baca Pelajar di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang masih berada pada kategori rendah dalam hal minat baca, termasuk Kota Makassar yang merupakan Ibu

Kota Provinsi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk masih dominannya budaya tutur dibandingkan dengan budaya baca. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat baca yakni budaya nonton di Kota Makassar lebih dominan dibanding budaya baca. Selain itu, persoalan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan aspek lainnya juga merupakan faktor penentu yang mempengaruhi minat baca pelajar di Kota Makassar.

Di Sulawesi Selatan proses minat baca adalah aktivitas akademik yang didalamnya terus-menerus menggali dan mengasah ilmu pengetahuannya dengan membaca. Membaca buku merupakan salah satu aktivitas belajar yang efektif untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan membaca pelajar dapat memperoleh pengetahuan dengan cepat dan mudah karena tinggal memilih buku yang akan dibaca, membukanya dan mulai membaca kata-perkata. Oleh karena itu membaca semestinya menjadi aktivitas pokok akademika khususnya pelajar.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam Undang-undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada Pasal 50 disebutkan:

“Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan yang bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.”

Menumbuhkan budaya gemar membaca dan gemar berkunjung ke perpustakaan berdasarkan UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 8 ayat (a) dan Peraturan Pemerintah. Program pemerintah kota Makassar yakni Gerakan Makassar Gemar Membaca yang dicanangkan oleh Bapak Walikota Makassar sejak 5 Juni 2005.

Tetapi dalam penerapannya banyak sekali kendala yang dihadapi dalam membangkitkan minat membaca terhadap pelajar di Kota Makassar. Pada zaman modern seperti sekarang ini, jarang kita temukan peserta didik yang gemar membaca. Banyak dari mereka lebih memilih untuk bermain sosial media. Melihat kenyataan bahwa tidak semua orang gemar membaca, dapat diperkirakan bahwa pelajar di Makassar menjadikan suatu tantangan bagi kita untuk menjadikan kegiatan membaca menjadi sebuah kegiatan yang menarik dan rutin dalam agenda sehari-hari.

Adapun perbandingan dua penelitian terdahulu yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan publik, menurut Abdullah Ramdhani (2017). Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: aspek kewenangan, sumber daya, komunikasi dan disposisi. Dimensi-dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik, diantaranya: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

Implementasi kebijakan dalam upaya mewujudkan pendidikan, Ellen Landriany (2014), yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan, mendeskripsikan faktor pendukung, dan mendeskripsikan faktor penghambat. Mensosialisasikan beberapa kegiatan utama dengan pendekatan pada siswa guna mendapatkan dukungan yang sempurna sehingga menciptakan kesepakatan yang mutlak .masih dijumpai berbagai situasi permasalahan yang menghambat , seperti satuan tugas yang yang tidak tepat waktu.

Berbeda halnya dengan fakta yang dihadapi pada saat ini dimana jarang kita temukan peserta didik yang memiliki minat baca yang tinggi sehingga sulit untuk meningkatkan minat baca, karena disebabkan oleh kemajuan teknologi. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan minat baca pelajar di Kota Makassar sehingga muncul judul sebagai berikut: ***“Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bentuk Pelaksanaan Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, Implementasi Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara program pemerintah meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan

Carl J Federick (dalam Agustino : 2008), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

David Easton (dalam Nugroho : 2008), menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau output dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu politik, sistem politik terdiri dari *input*, *throughput*, dan *output*.

Menurut Amri Marzali (2012), kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Wahab (2008), mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakaan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kecil lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Menurut James E Anderson (dalam Islamy : 2009), mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Carl Friedrich (dalam Indiahono : 2009), menyatakan bahwa “kebijakan merupakan satu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”. Ia juga mengatakan bahwa didalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*).

Menurut Nugroho (2009), kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan public, yaitu yang dibuat oleh legislatif, eksekutif dan legislatif bersama eksekutif dan sebaliknya). Sedangkan Wahab (2008), mengemukakan beberapa bentuk kebijakan publik yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/mendasar. Sesuai dengan UU No.10/2004 tentang Pembentukan perundang-undangan pasal 7, hirarkinya yaitu; (1) UUD Negara RI Tahun 1945; (2) UUD/Peraturan Pemerintah Pengganti UU; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) atau penjelas pelaksana, dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan menteri,

Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Menurut Iskandar (dalam Ramdhani : 2012), kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Lebih lanjut, menurut Thoha (dalam Ramdhani : 2012), kebijakan memiliki dua aspek, yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tubuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi msyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun

menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

B. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Salah satu definisi yang diberikan oleh Robert Eystone dalam Budi Winarno (2007: 15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya*". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Thomas R Dye sebagaimana

dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Parker sebagaimana disunting Abdul Wahab (2011) memberikan batasan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau tanggapan atas suatu krisis. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Hal senada juga diungkapkan Woll (Tangkilisan 2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. David Easton

sebagaimana dikutip Agustino (2008) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”.

Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

C. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya

sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno : 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. MAzmanian dan Paul Sabatier (dalam Solichin Abdul Wahab : 2008), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Edward III (dalam Suranto : 2014), implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan

publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Wahab (2008) mengemukakan beberapa definisi dari beberapa sumber mengenai implementasi kebijakan:

- 1) Kamus Webster, menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, yang biasanya dalam bentuk UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Kempmen, dll.
- 2) Van Meter dan Van Horn, merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu (pejabat) atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- 3) Mazmanian dan Sabatier, menjelaskan makna implemetasi yaitu bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi, sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau suatu peristiwa.

Pendapat Cleaves (dalam Wahab : 2008), yang secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju

tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan pogram-program yang telah dirancang sebelumnya.

Tahjan (2008), menjelaskan bahwa secara estomologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan public yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono : 2011), dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Model yang dikemukakan Edward III (dalam Agustino : 2012) implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

1. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi, pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam

melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan .

b) Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumber daya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Edward III (dalam Agustino : 2012) menyatakan bahwa hal ini meliputi empat komponen, yaitu:

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang seiring terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
2. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan

cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

4. Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c) Disposisi atau attitudes

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan atau program, sedangkan apabila implementor atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi atau pelaksanaan program juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Organisasi

Menurut Edward III (dalam Nugroho : 2011), menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Model yang dikemukakan Soren C. Winter (dalam Peters : 2008) memperkenalkan model implementasi integratif (Integrated Implementation Model). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak atau hasil implementasi kebijakan itu sendiri.

Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni:

1. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi,
2. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional,
3. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya.

D. Kebijakan Pemerintah Daerah

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (2007) yang dimaksud dengan

kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Sesuai dengan system administrasi Negara Republik Indonesia, kebijakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Kebijakan Internal (Manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
- 2) Kebijakan eksternal (Publik), yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KepMen) dan lain lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah akan melahirkan Surat keputusan (SK), peraturan daerah (PerDa) dan lain lain.

Dalam penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada hal hal berikut:

- 1) Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.
- 2) Konsisten dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.
- 3) Berorientasi ke masa depan.

- 4) Berpedoman kepada kepentingan umum.
- 5) Jelas dan tepat serta transparan.
- 6) Dirumuskan secara tertulis.

Sedangkan kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa tingkatan yaitu:

1. Kebijakan Nasional

Yaitu kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/Negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN. Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan presiden bersama-sama dengan DPR.

Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa:

- 1) UUD 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-undang
- 4) Peraturan pemerintah pengganti undang undang (Perpu) dibuat oleh presiden dalam hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR.

2. Kebijaksanaan Umum

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, ketetapan MPR maupun undang undang guna mencapai tujuan nasional.

Penetapan kebijaksanaan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijaksanaan umum tersebut adalah tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti halnya peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Kepres) serta Instruksi Presiden (Inpres). Sedangkan kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu. Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu presiden yaitu para menteri atau pejabat lain setingkat dengan menteri dan pimpinan sesuai dengan kebijaksanaan pada tingkat atasnya serta perundang-undangan berupa peraturan, keputusan atau instruksi pejabat tersebut (menteri/pejabat)

3. Strategi kebijakan

Merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota berupa surat keputusan yang mengatur tata laksana kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia.

E. Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Baca

Menurut Shaleh (2009) upaya untuk meningkatkan gemar membaca atau minat baca harus terus dilakukan, khususnya harus dimulai dari anak-anak. Misalnya di lingkungan sekolah promosi membaca hendaknya

dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dari Sekolah Dasar. Kegiatan untuk meningkatkan minat baca harus diadakan dan digalakan. Disamping pembinaan disekolah dalam hal menyediakan fasilitas membaca dan pembinaan perpustakaan sekolah yang baik dan lengkap. Hal yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan minat baca adalah mengadakan bentuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif untuk dilakukan terhadap meningkatkan minat baca. Kegiatan tersebut dapat dikembangkan, dan sangat bergantung kepada kreativitas, inovasi dan inisiatif tenaga kerja pustakawan.

Dalam hal ini kita sadari bersama bahwa minat baca pelajar tentu saja berimbas dan mempengaruhi prestasinya di sekolah. Jika minat bacanya tinggi maka, bukan tidak mustahil pelajar yang dihasilkan tersebut akan menjadi pelajar yang cerdas, kreatif dan kritis. Banyak informasi yang ia peroleh dengan membaca berbagai referensi buku, jurnal, artikel sebagai cakrawala pengetahuannya dalam berpikir dan bertindak. Bukannya sudah menjadi tujuan utama setiap sekolah atau tertentu dalam mencetak lulusan pelajar yang berbobot dan berkualitas tidak hanya pintar dalam teori tetapi dia juga mampu untuk mengembangkannya.

Renstra pembangunan pendidikan nasional tahun 2005-2009 (Depdiknas, 2010) merupakan penjabaran peraturan presiden no.07 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2005-2009 sektor pendidikan yaitu program pengembangan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan bertujuan untuk mendorong berkembangnya minat baca bagi anggota masyarakat.

Membaca adalah sesuatu hal yang sangat mutlak bagi pelajar untuk meningkatkan cakrawala pengetahuan. Dengan membaca banyak referensi maka prestasi di sekolah akan bisa tercapai. Pelajar yang berprestasi dia tidak hanya sebatas mengada pada referensi bacaan yang diberikan guru ketika belajar akan tetapi dia akan mencari dan terus membaca berbagai referensi lain yang mempunyai diluar tema sekolahnya dengan itu pengetahuannya semakin luas. Dalam hal ini jelas bahwa minat baca seorang pelajar sangat berpengaruh dalam meraih prestasi dan menambah cakrawala pengetahuan. Bukan hanya prestasi dan pengetahuan, minat baca seorang pelajar juga dapat menambah kecerdasannya. Yang dimaksud kecerdasan disini adalah seberapa cepat ia menerima informasi dan mengolahnya serta mengaktualisasikannya. Dengan banyak membaca otak akan selalu dilatih untuk berpikir dan mengasah daya analisisnya terhadap respon problematika yang ada, serta mampu memberikan solusi yang solutif terhadap problematika tersebut.

Minat baca pelajar yang tinggi dapat menambah wawasan pengetahuan dan kecerdasannya. Bila dua hal ini bisa didapat, maka seseorang pelajar akan semakin percaya diri dan melahirkan sikap optimis dalam menilai dan menghadapi sesuatu. Ketika di sekolah guru bertanya mengenai masalah sekolahnya, ia sudah tidak takut dan malu lagi karena dengan modal bacaannya tersebut ia memiliki wawasan dan kecerdasan

otaknya akan bekerja dan memberikan jawaban yang logis dan komperhensif. Tidak diragukan lagi, bahwa membaca merupakan sarana penting bagi setiap orang yang ingin maju. Begitu pula dengan para pelajar, membaca merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan tidak hanya pengetahuan tetapi juga hasil belajar. Karena dengan membaca membuat mereka menjadi cerdas, kritis dan mempunyai daya analisa yang tinggi. Dengan membaca selalu tersedia waktu untuk merenung, berfikir dan mengembangkan kreativitas berfikir.

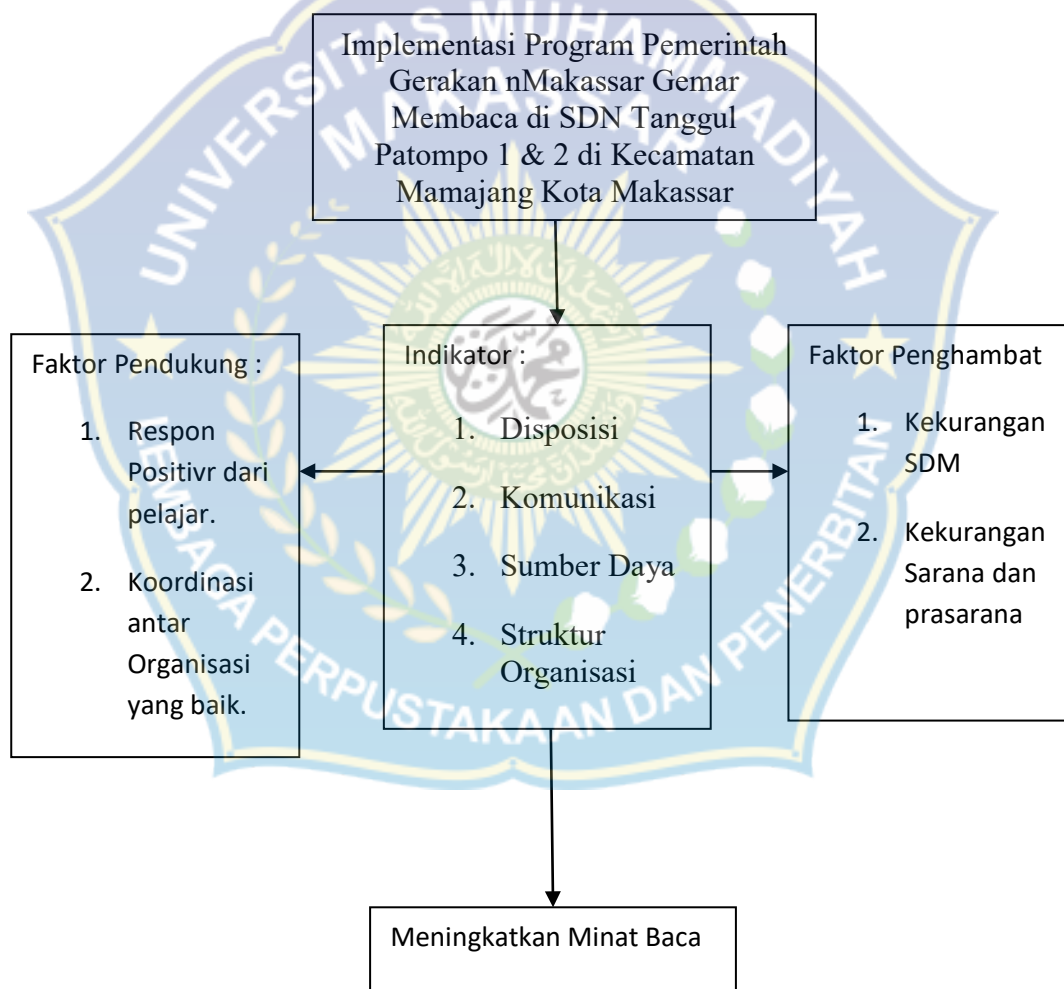
Indikator pelajar yang memiliki minat baca tinggi adalah: rajin mengunjungi perpustakaan sekolah, rajin mencari berbagai koleksi pustaka, kemanapun pergi selalu membawa bahan bacaan, rajin meminjam buku-buku perpustakaan, selau mencari koleksi pustaka meskipun tidak ada tugas dari guru, waktu luangnya selalu digunakan untuk membaca buku-buku ilmu pengetahuan yang berguna dan selalu mencari informasi-informasi yang berguna dari *browsing* maupun *searching* internet (Barkah, 2008)

F. Kerangka Pikir

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam kebijakan publik karena hasil dari kebijakan sendiri nantinya akan ditentukan setelah implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini akan fokus pada bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca pelajar di Kota Makassar melalui indikator disposisi pelaksana, Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Organisasi sehingga tercapainya meningkatkan minat baca.

Diharapkan dengan mengimplementasikan program tersebut dan diharapkan tercapainya minat baca yang baik dan berkelanjutan khusus bagi pelajar yang berada di Kota Makassar seperti tergambar pada bagan kerangka pikir berikut:

Bagan Kerangka Pikir



G. Fokus Penelitian

Implementasi kebijakan adalah implementasi untuk memecahkan suatu masalah. Implementasi Kebijakan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem dalam pendidikan, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dengan Implementasi Program Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar dengan beberapa indikator yaitu, disposisi, Komunikasi, dan Sumber Daya.

H. Dekripsi Fokus Penelitian

1. Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi.
2. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan implementasi suatu program atau kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi serta konsistensi informasi yang disampaikan.
3. Sumber daya merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsure lain dalam kehidupan dimana ia dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
4. Faktor Pendukung adalah serangkaian kegiatan yang mendukung terlaksananya peningkatan minat baca siswa di kota Makassar.

5. Faktor Penghambat adalah seluruh rangkaian proses yang menghambat terlaksananya program peningkatan minat baca siswa di kota Makassar.
6. Peningkatan minat baca pelajar dapat dilakukan melalui yaitu, gemar membaca, perpustakaan keliling, dan dongeng keliling.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan selama dua bulan terhitung dari tanggal 17 September 2018 – 30 Oktober 2018 dan tempat penelitian ini di Dinas Perpustakaan dan di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2. Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti menganggap bahwa tempat inilah yang sangat tepat untuk mendapatkan informasi mengenai judul peneliti yang terkait dan merupakan salah satu cara untuk memecahkan permasalahan saat ini.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diambil yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara.
2. Tipe penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus. Hal ini untuk menjawab semua permasalahan yang akan diangkat atau diteliti, oleh sebab itu untuk menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan, kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan.

C. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari informan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
2. Data Sekunder adalah data yang di peroleh peneliti bersumber dari dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek yang di teliti.

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* Menurut Sugiyono (2013) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasisosial yang diteliti.

Dalam penelitian kali ini beberapa orang yang dijadikan informan adalah dari unsure pemerintah daerah yaitu pada perpustakaan dan juga pelajar Pemilihan informan didasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan dapat memberikan informan tentang Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Adapun tabel informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	H. Muhyiddin, SE, MM	L	MY	Sekretaris Dinas Perpustakaan Kota Makassar	1
2.	Muhammad Amran Kudus	L	MA	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kebudayaan Gemar Membaca	1
3.	Muliawati, SE	P	MW	Kepala Seksi Layanan dan Kerja Sama Perpustakaan	1
4.	Samsuddin	L	SS	Kepala Sekolah SDN Tanggul Patompo 2	1
5.	Risnawati, S.Pd	P	RS	Pengelola Perpustakaan SDN Tanggul Patompo 1	1
6.	Ahmad Dira Djelani	L	AD	Pelajar SDN Tanggul Patompo 1	1
7.	Suci Rahmadani	P	SR	Pelajar SDN Tanggul Patompo 2	1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau melihat secara langsung bagaimana Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan peningkatan minat baca pelajar di kota Makassar, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan badan informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi tertentu yang dianggap mendukung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh di kerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisa interaktif. Menurut Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa dalam model ini terdapat tiga komponen yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data, Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
2. Reduksi Data, Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang memper tegas, memperpendek, membuat fokus, membuat hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti data dilakukan.
3. Sajian Data, Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat dipahami.
4. Penarikan Kesimpulan, Dalam awal pengumpulan data, penelitian sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan simpulan dapat di pertanggung jawabkan.

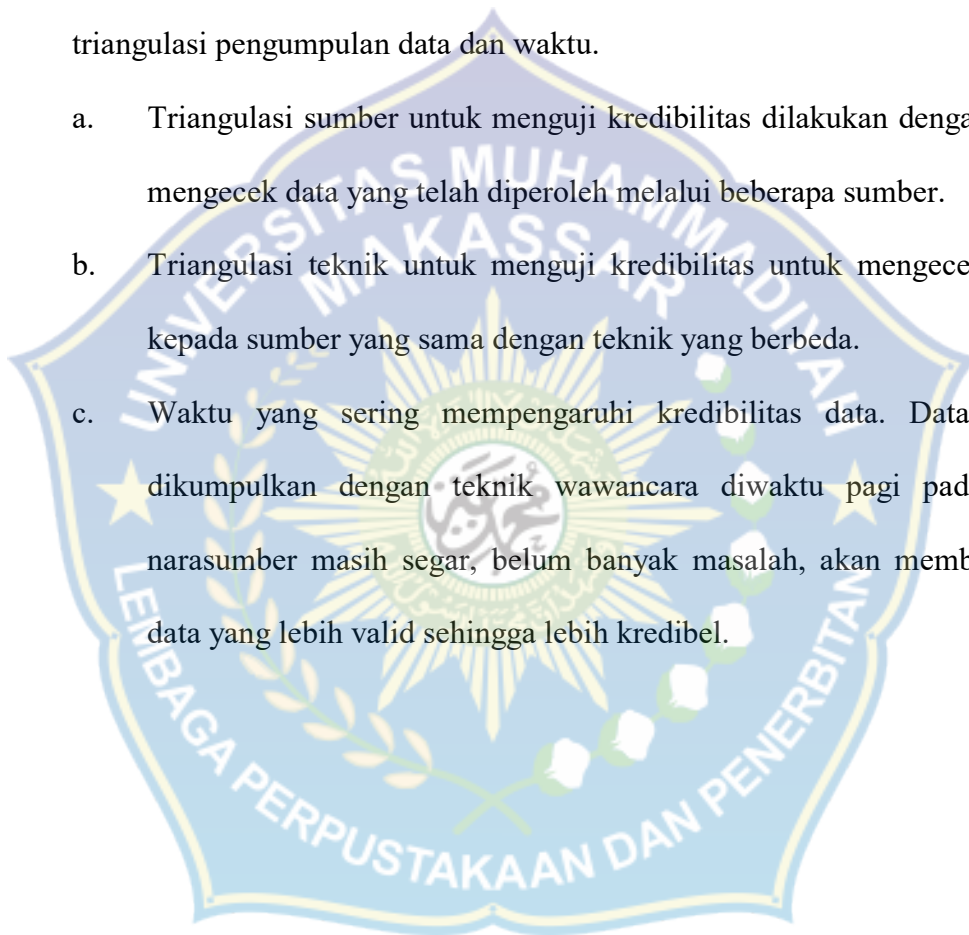
G. Keabsahan Data

Validitasi data sangat mendukung akhir penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran

data yang akan dikumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut Sugiyono (2011) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan waktu.

- a. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas untuk mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Waktu yang sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara diwaktu pagi pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada sub bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sejarah dinas perpustakaan kota Makassar, Sejarah Gerakan Makassar Gemar Membaca, visi dan misi akan dibahas sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis dan Karakteristik Masyarakat Kota Makassar

Kota Makassar ditinjau dari letak geografis memiliki potensi yang sangat strategis sebagai pusat pelayanan dan pintu gerbang pengembangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 175,77 km² meliputi 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan termasuk 12 Kepulauan dengan jumlah penduduk 1.369.606 jiwa (2017) yang dihuni beragam etnis dan budaya mempunyai impian besar yakni menjadikan Makassar masuk dalam jajaran kota dunia (World City).

Ada 5 (lima) pokok kebijakan Pemerintah Kota Makassar sesuai Perda No. 4 Tahun 2017 tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019, adalah :

- a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- b) Pengembangan tata ruang dan lingkungan
- c) Penguatan struktur ekonomi
- d) Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi
- e) Penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia

Dapat dilihat bahwa perhatian pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan SDM menjadi prioritas pertama dalam pelaksanaan pembangunan. Kemajuan sebuah kota tak hanya dilihat dari kemajuan fisik semata tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sejak dicanangkan Gerakan Makassar Gemar Membaca (GMGM) tanggal 5 Juni 2005 yang lalu dan dibarengi dengan pemerataan sarana perpustakaan mulai dari Kecamatan, Kelurahan hingga kepulauan akhirnya minat baca masyarakat mulai tumbuh dengan indikator yang dapat dilihat dari jumlah kunjungan setiap tahunnya meningkat.

1. Sejarah Gerakan Makassar Gemar Membaca (GMGM)

Pendidikan sangat penting bagi suatu bangsa karena menjadi salah satu jaminan keselamatan dan eksistensi di masa depan. Saat ini dibutuhkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Kebutuhan akan informasi sangat menunjang hal tersebut karena kita banyak membutuhkan informasi atau ilmu. Menyadari hal itu, Pemerintah Kota Makassar melihat pentingnya membiasakan membaca di masyarakat, mengakses informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Makassar tertinggal dengan daerah lain salah satunya karena kurangnya minat baca masyarakatnya. Untuk itu dibutuhkan sebuah program untuk mendorong minat baca masyarakat Makassar yang terwujud dengan Gerakan Makassar Gemar Membaca.

Gerakan Makassar Gemar Membaca (GMGM) dicanangkan pada tanggal 05 Juni 2005, di Pantai Losari yang diprakarsai oleh Walikota Drs. Ilham Arif Sirajuddin, MM. dan DR. Hj. Marwah Daud Ibrahim, MA. Program ini tujuan jangka pendeknya membutuhkan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya membaca dalam meningkatkan daya pikir dan kualitas masyarakat. Adapun tujuan jangka panjang, menjadikan masyarakat “membaca” sebagai kebutuhan dan terciptanya suasana religius dengan mengakses sarana informasi yang mudah ditemukan seperti pada perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, kantor, sekolah, kampus dan lainnya.

Program GMGM adalah merupakan suatu gerakan moral untuk mendorong masyarakat supaya lebih cerdas dengan mendorong budaya bahasa atau membaca. Dasar pertimbangan diprogramkannya Gerakan Makassar Gemar Membaca oleh Pemerintah Kota Makassar adalah bahwa:

- a. Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak pembangunan bangsa yang berhadapan langsung dengan masyarakatnya sebagai pelaku sekaligus konsumen dan pemasok dalam kaitannya dengan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dimilikinya.
- b. Kemampuan membaca merupakan kompetensi dasar manusia yang sangat penting untuk mendongkrak kompetensi lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
- c. Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Umum merupakan wahana yang paling efektif dan efisien untuk mempercepat proses pencerdasan

masyarakat melalui penyediaan informasi dan bahan bacaan yang mutakhir, lebih banyak dan bervariasi.

Melalui Gemar Membaca ini diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan minat baca warga. Selain dapat meningkatkan kemampuan masyarakat menyerap berbagai informasi, program ini menyadari sepenuhnya bahwa membaca merupakan prasyarat utama untuk memacu kualitas individu kebangkitan komunal seluruh warga Makassar.(Muchtari Tahir 2008). Pada awalnya perencanaan program GMGM ini, tidak sedikit yang meragukan efektifitasnya namun berkat bekerja dengan hati yang tulus serta kerja keras seluruh team serta dukungan seluruh pihak khususnya wali kota Makassar pada saat itu, keraguan demi keraguan dijawab dengan hasil kerja.

Gerakan Makassar Gemar Membaca sebagai pilot project percontohan Nasional peningkatan minat baca di Indonesia, serta kepala Perpustakaan Nasional RI. Memberikan bantuan dua mobil Perpustakaan Keliling dan penghargaan Pustaloka kepada Kepala Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengolahan Data Makassar. Partisipasi aktif masyarakat juga sebagai indikator keberhasilan yang dapat dilihat dari maraknya muncul kafe baca serta komunitas baca.

Menurut Nuraeni Ma'mur (2006), saat ini Gerakan Makassar Gemar Membaca dapat dikatakan sukses dalam menjalankan programnya. Hal ini

dapat dilihat dari banyaknya bantuan, penghargaan serta prestasi lain yang diperoleh selama 3 tahun terakhir ini, yaitu:

- 1) Mendapat bantuan dari perpustakaan Nasional berupa 2 unit perpustakaan keliling yang dioperasikan secara bergiliran ke sekolah-sekolah, rumah ibadah dan pusat keramaian.
- 2) Mendapat bantuan “motor pintar” dan sarana pendukung operasional perpustakaan dari Ikatan Istri Kabinet Indonesia Bersatu yang di ketuai oleh Ibu Ani Yudiyono.
- 3) Mendapat bantuan buku dari sekretariat KORPRI Kota Makassar.
- 4) Mendapat bantuan 400 koleksi buku dari BRI bekerja sama dengan lembaga pemasyarakatan, rumah ibadah, dan rumah sakit untuk mendirikan sudut baca.
- 5) Mendapat bantuan 3.100 eksemplar buku pelajaran dari panitia Petra Peduli Kasih 2007.
- 6) Sejak berjalannya program GMGM ini, jumlah pembaca di kota Makassar meningkat dari 3.147 orang (tahun 2006) menjadi 9.289 orang (tahun 2008).
- 7) Mendapat penghargaan pustaloka dari perpustakaan Nasional.
- 8) Menteri Pendidikan Nasional menjadikan GMGM sebagai pilot project percontohan Nasional peningkatan minat baca di Indonesia.

Menurut Kepala Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengolahan Data, Hj. Nuraeni Ma'mur, S.H.,MH. Meskipun mendapat kendala dengan minimnya

daftar judul buku yang dimiliki untuk menunjang gerakan ini, namun minat baca dari masyarakat semakin meningkat. Indikator dari peningkatan tersebut dilihat dari antusias atau minat minat baca masyarakat yang semakin baik dan juga semakin banyaknya pengunjung di taman-taman bacaan. Saat ini, hasil dari program Gerakan Makassar. Gemar Membaca (GMGM) belum dapat dilihat secara langsung sebab Gerakan Makassar Gemar Membaca (GMGM) merupakan program jangka panjang, sehingga butuh waktu untuk merealisasikan.

Program Gerakan Makassar Gemar Membaca merupakan salah satu program pemerintah kota Makassar yang telah dicanangkan sejak tahun 2005. Sebelum itu hanya terdapat 14 unit taman baca di kota Makassar. Pada tahun 2013 jumlah tersebut bertambah di mana tercatat sebanyak 40 taman baca. Hal ini Gerakan Makassar Gemar Membaca meningkatkan kegemaran membaca masyarakat kota Makassar. Program Gerakan Makassar Gemar Membaca sepenuhnya didukung oleh BAPPD dalam mengimplementasikan tujuan dari program pemerintah Kota Makassar.

Pada tahun 2009 program ini mendapat kunjungan dari para kepala-kepala Badan Arsip dan Perpustakaan. Yang secara langsung diterima di ruang pola kantor Walikota. Pemerintah kota Makassar menyampaikan bahwa tujuan Program Gerakan Makassar Gemar Membaca adalah agar membaca menjadi budaya di kalangan masyarakat. Program ini juga telah mendapat penghargaan pada tahun 2009 dari mendiknas dan perpustakaan Nasional

pada tahun 2010 sebagai program percontohan nasional. Dalam menjalankan program Gerakan Makassar Gemar Membaca pendanaannya bersumber dari pemerintah kota Makassar dengan adanya Program Gerakan Makassar Gemar Membaca didirikan beberapa taman baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Selanjutnya selain hal tersebut di atas, program ini tidak hanya dijalankan oleh instansi pemerintahan seperti Kantor Arsip Perpustakaan dan pengelolaan Data, tetapi juga dijalankan oleh sekumpulan relawan yang terdiri dari 20 orang yang turut andil dalam mensukseskan program Gerakan Makassar Gemar Membaca (GMGM) ini. Para relawan tersebut bukanlah PNS dan anggarannya pun tidak di APBD. Meski demikian program Gerakan Makassar Gemar Membaca (GMGM) dapat dilaksanakan dengan adanya bantuan sponsor-sponsor yang juga ingin melihat kesuksesan program ini.

2. Visi dan Misi Gerakan Makassar Gemar Membaca (GMGM)

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang bersifat fundamental dan sekaligus memmanifestasikan dinamika pembangunan dari hubungan aspek. Visi daripada Gerakan Makassar Gemar Membaca yaitu: “mewujudkan masyarakat yang cerdas dengan membaca” visi tersebut mengandung makna dengan membaca sebagai kunci utama untuk mencerdaskan anak bangsa.

Misi dari pada Gerakan Makassar Gemar Membaca yaitu:

- a. Rajin membaca kita dapat mentransfer IPTEK untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan dengan masyarakat.
- b. Pemerintah membangun perpustakaan untuk mencerdaskan anak bangsa. Dengan demikian melihat dari Visi dan Misi dari Gerakan Makassar Gemar membaca kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan membaca adalah kunci masa depan utamanya untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah Persentase Taman Baca yang dikembangkan Dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah taman baca yang dikembangkan oleh dinas perpustakaan kota Makassar, seperti yang dipaparkan.

Tabel. 2 Persentase Taman Baca yang Dikembangkan

No.	Tahun	Persentase Pengembangan Taman Baca
1.	2017	58 %
2.	2018	65.36 %
3.	2019	65.36 %

(Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2019)

Pada tabel 2 dapat dilihat terjadi peningkatan taman baca yang dikembangkan oleh dinas perpustakaan kota Makassar dari tahun 2017 yang persentase pengembangan sekitar 58 % naik pada tahun 2018 dan 2019 pada

angka 65,36 %. Hal ini menunjukkan ada peningkatan yang terjadi dalam pengembangan taman baca di kota Makassar.

2. Persentase Peningkatan Budaya Baca

Peningkatan budaya baca merupakan salah satu program pengembangan yang dilakukan oleh dinas perpustakaan kota Makassar, dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan sebanyak 2 % seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3 Persentase Peningkatan Budaya Baca

No.	Tahun	Persentase Peningkatan Budaya Baca
1.	2017	58 %
2.	2018	60 %
3.	2019	60 %

(Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2019)

Pada tabel 3 terkait peningkatan budaya baca tidak terjadi peningkatan budaya baca di kota Makassar. Tahun 2017 persentase budaya baca sebanyak 58 % dan naik sekitar 2 % pada tahun 2018 dan 2019 sekitar 60 % tentu pencapaian tersebut harus lebih ditingkatkan kembali dengan membuat rancangan program-program yang terbaik.

3. Cakupan Persentase Perpustakaan yang dikelola

Program pengembangan selanjutnya yang dilakukan oleh dinas perpustakaan kota Makassar adalah cakupan persentase perpustakaan yang dikelola yang dalam tiga tahun terakhir juga terjadi peningkatan seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel. 4 Persentase Perpustakaan yang dikelola

No.	Tahun	Persentase Perpustakaan yang dikelola
1.	2017	58 %
2.	2018	64 %
3.	2019	70 %

(Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2019)

Pemaparan pada tabel.4 dapat dilihat terjadi peningkatan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir terkait perpustakaan yang dikelola. Tahun 2017 perpustakaan yang dikelola sampai pada angka 58% selanjutnya pada tahun 2018 naik menjadi 64% dan pada tahun 2019 naik pada angka 70%. Tentu dengan peningkatan ini dapat disimpulkan bahwa dinas perpustakaan kota Makassar benar-benar sangat memperhatikan pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan minat baca di kota Makassar.

B. Implementasi Program Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar

Pada tahap menjalankan kebijakan pelaksana mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan setiap program yang akan di laksanakan. Teori ini kemudian di sebut disposisi, komunikasi, sumber daya dan struktur organisasi dimana tingkat keberhasilan dalam implementasi ditentukan oleh implementor atau pelaksana.

Membaca merupakan serangkaian kegiatan pikiran yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memahami suatu informasi melalui indra penglihatan dalam bentuk simbol-simbol yang rumit, yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai arti dan makna. Membaca merupakan proses komunikasi. Dalam membaca terdapat aktivitas atau proses penangkapan dan pemahaman sejumlah pesan atau informasi dalam bentuk tulisan.

1. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, dalam hal ini merupakan implementor dari program, dalam hal ini adalah aparatur birokrasi.

Implementasi pemerintah kota Makassar dalam meningkatkan minat baca pelajar dengan upaya menumbuhkan sikap gemar membaca pada pelajar di kota Makassar pemerintah daerah melalui dinas perpustakaan kota Makassar melakukan beberapa kegiatan yang menarik untuk para pelajar untuk senantiasa

membaca, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan lomba bercerita tingkat SD. Kegiatan tersebut hampir dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan peserta dari seluruh SD yang ada di kota Makassar.

“Salah satu upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan gemar membaca dikalangan pelajar terkhusus bagi anak-anak kita yang masih duduk dibangku sekolah dasar misalnya dengan melakukan kegiatan lomba bercerita. Dimana anak-anak tersebut menceritakan hasil dari bacaan mereka. Kegiatan seperti ini merupakan salah satu upaya agar dapat menumbuhkan minat baca dari anak-anak kita sebagai generasi penerus pembangunan kedepan.”(Wawancara dengan MY Tanggal 20 September 2018).

Hasil wawancara dengan MY penulis dapat menyimpulkan pelaksanaan gemar membaca salah satu ide kreatif pemerintah kota Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan terkait peningkatan minat baca pelajar agar menarik para pelajar untuk gemar membaca. Sehingga tujuan pemerintah kota Makassar dalam menarik pelajar gemar membaca dapat terpenuhi.

Tujuan pembinaan minat baca adalah untuk menciptakan pelajar membaca (*reading society*), masyarakat belajar (*learning society*) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditandai dengan tercipta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai piranti pembangunan nasional menuju masyarakat madani. Sasaran pembinaan yang dituju adalah masyarakat secara keseluruhan dalam berbagai lapisan yang ada meliputi segala usia, jenis kelamin, jenis dan jenjang pendidikan, jenis pekerjaan atau profesi, dan sebagainya.

Sebagai upaya dari dinas perpustakaan kota Makassar dalam mengimplementasikan program gemar membaca di tingkat pelajar kota Makassar salah satunya dengan mengadakan sebuah kegiatan wisata baca. Wisata baca merupakan sebuah kegiatan yang mengajak pelajar dan juga masyarakat untuk melakukan rekreasi edukatif guna meningkatkan pengetahuan.

“Beberapa program yang kami lakukan dalam mengajak pelajar untuk gemar membaca salah satunya dengan melakukan kegiatan wisata baca. Kegiatan ini memadukan wisata dengan banyak muatan edukatif. Beberapa item kegiatanpun biasanya dilaksanakan lomba, pameran dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan di 33 taman baca yang terletak di setiap kecamatan di kota Makassar.” (Wawancara dengan MA Tanggal 20 September 2018).

Hasil wawancara dengan informan MA bentuk implementasi kebijakan dalam menarik minat baca pelajar, dinas perpustakaan kota Makassar melaksanakan kegiatan wisata atau rekreasi yang mengandung nilai edukatif merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah kota Makassar dalam rangka meningkatkan gemar membaca terhadap pelajar di kota Makassar.

Minat baca merupakan potensi yang sudah ada di dalam diri setiap orang yang terdapat dalam otak manusia sejak masa kosepsinya (pembuahan) dalam rahim ibu. Potensi itu akan tumbuh dan berkembang setelah dilahirkan ke dunia, tergantung dari faktor dorongan yang tersedia, situasi dan kondisi, lingkungan kehidupan dari sistem yang berlaku.

Dinas perpustakaan kota Makassar berupaya untuk menciptakan gemar membaca di tingkat pelajar. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pengimplementasian kebijakan gemar membaca adalah dengan melakukan sosialisasi baik terhadap para pelajar .

“Meningkatkan gemar membaca bagi pelajar langkah yang kemudian ditempuh adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para pelajar, dalam sosialisasi tersebut tentu dipaparkan manfaat dari membaca, pentingnya ilmu pengetahuan, dan bagaimana kemudian ilmu pengetahuan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelajar guna pembangunan bangsa kedepan. Dengan lebih banyak melakukan sosialisasi para pelajar juga termotivasi dengan sendirinya untuk meningkatkan minat bacanya.” (Wawancara dengan MW Tanggal 20 September 2018).

Hasil wawancara dengan informan MW dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Makassar gemar membaca dinas perpustakaan kota Makassar melakukan sosialisasi terhadap kalangan pelajar, melalui sosialisasi tersebut para pelajar dapat menumbuhkan minat baca dan dengan sendirinya akan terlibat dalam program-program yang dibuat oleh pemerintah kota Makassar. Kalangan pelajar tingkat SD panitia pelaksana merangkaikan dengan lomba menggambar. Melalui kegiatan tersebut diharapkan para pelajar dapat meningkatkan minat bacanya dan juga selalu gemar dalam membaca.

Implementasi kebijakan dalam meningkatkan minat baca di kota Makassar khususnya pelajar pada pengembangan perpustakaan sekolah dengan sangat memperhatikan pelayanan serta sarana dan prasarana yang tersedia di dalam perpustakaan.

“Sekolah ini telah mendapatkan arahan dari pemerintah kota Makassar agar memaksimalkan perpustakaan disekolah, mulai dari penyediaan buku dan beberapa fasilitas lainnya ini merupakan sebuah langkah yang sangat bagus dapat mencerdaskan para siswa dan juga mengurangi beban pelajar.” (Wawancara SS 28 Maret 2019).

Hasil wawancara dengan informan SS dapat disimpulkan adanya respon yang sangat positive dalam gemar membaca di perpustakaan sekolah, terutama para siswa tidak lagi dibebankan untuk membeli buku karena buku telah tersedia di perpustakaan sekolah.

Kegemaran membaca bagi masyarakat, terutama sekali siswa sangatlah penting. Yang utama sekali adalah membaca buku pelajaran, catatan maupun buku sumber belajar. Kegiatan ini berkaitan dengan hasil belajar siswa. Semakin banyak siswa meluangkan waktu untuk membaca semakin bagus prestasi belajar siswa. Jadi, membaca buku bagi siswa tidak hanya saat terdesak seperti mau ulangan atau ujian di sekolah.

Dalam rangka implementasi program gemar membaca kota Makassar membangun kerjasama dengan dinas perpustakaan terkait dengan kurikulum yang ada disekolah, sehingga perpustakaan sekolah mengevaluasi pemanfaatan yang ada.

“untuk program gemar membaca perpustakaan sekolah harus lebih banyak bacaan yang terkait dengan kurikulum pendidikan yang diajarkan, hadirnya kami hanya untuk memastikan perpustakaan sekolah itu benar-benar berjalan dengan baik, dengan banyaknya jumlah buku yang ada tetap dikordinir oleh pihak sekolah.” (Wawancara dengan RS 21 Juni 2019).

Hasil wawancara dengan RS dapat dilihat keberadaan perpustakaan sekolah terkait dengan pelajar yang gemar membaca sudah ada dalam penyediaan bahan bacaan yang berbasis kurikulum pendidikan yang sedang berjalan tentu dengan membangun kerjasama dengan dinas perpustakaan.

Pembinaan gemar membaca sejak dini sudah merupakan program wajib bagi pemerintah kota Makassar untuk menanamkan minat gemar membaca utamanya bagi pelajar tingkat SD. Salah satu bacaan yang sangat diminati bagi pelajar tingkat sekolah dasar adalah buku yang berisikan cerita dilengkapi dengan gambar.

“Buku yang paling saya suka baca kak disini perpustakaan yang ada gambar-gambarnya, seperti cerita Malin Kundang ku suka saya bacai kak karena dia ajar ki untuk tidak kurang ajar sama mamak ta’ kalau berdosa ki’ sama mamak ta’ nekutuk ki nanti jadi batu seperti malin kundang.” (Wawancara dengan SR Tanggal 25 September 2018).

Kecendrungan pelajar tingkat sekolah dasar membaca cerita-cerita rakyat yang bergambar merupakan kesenangan tersendiri untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan isi yang diceritakan bacaan tersebut, setidaknya hal tersebut menarik gemar baca membaca pada tingkat pelajar dan mampu memahami isi dari bahan bacaan yang dibaca.

Menanamkan gemar membaca mulai sejak usia dini merupakan sebuah modal untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkemajuan. Agar hal tersebut dapat tercapai harus ada kerjasama dari seluruh stakeholder utamanya

pemerintah untuk menciptakan sebuah tempat yang mampu menarik pelajar untuk membaca.

Penyediaan fasilitas dalam rangka menciptakan masyarakat gemar membaca di kota Makassar telah dilakukan oleh instansi terkait. Menyediakan perpustakaan yang sejuk membuat para pengunjung nyaman ketika berada didalam perpustakaan. Langkah ini jelas merupakan sebuah bentuk untuk mewujudkan gemar membaca di kota Makassar.

“Kalau saya kak lebih ku suka membaca di perpustakaan sini, karena banyak buku, banyak juga teman-teman dari sekolah lain, baru dingin juga. Tidak sama kalau disekolah panas sekali jadi tidak konsen ki membaca. Buku paling saya suka baca kak tentang sejarah, biar di tau perjuangannya pahlawan ta dulu kasi merdeka Indonesia.”(Wawancara dengan AD Tanggal 25 September 2018).

Hasil wawancara dengan informan AD kondisi perpustakaan yang sejuk memberikan efek nyaman terhadap pelajar untuk membaca. Selain itu banyaknya bahan bacaan yang tersedia didalam perpustakaan membuat pelajar dapat mengganti bahan bacaan nya jika sudah bosan dengan bacaan yang sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait upaya dinas perpustakaan kota Makassar dalam merealisasikan gemar membaca bagi pelajar dengan melaksanakan kegiatan lomba membaca, melakuakan kegiatan wisata berbasis edukasi juga penyediaan sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dari pengunjung utamanya pelajar.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan tujuan dari pelaksanaan implementasi suatu program atau kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi serta konsistensi informasi yang disampaikan.

Dinas perpustakaan kota Makassar dalam mengimplementasikan kebijakan meningkatkan minat baca pelajar dalam informasi gemar membaca ini selain menjadi sebuah inovasi di ruang lingkup dinas perpustakaan juga diharapkan mampu menambah minat baca bagi masyarakat khususnya pelajar.

“Dalam upaya mengoptimalkan minat baca pelajar di kota Makassar pihak kami telah membentuk program gemar membaca, minat baca dan pemahaman bacaan dapat ditingkatkan melalui pendekatan pemrosesan informasi Saya fikir ini bahwa salah satu bentuk implementasi yang bagus dan diharapkan mampu menambah minat baca bagi masyarakat hususnya adik-adik kita yang pelajar.”(Wawancara dengan MY Tanggal 20 September 2018).

Hasil Wawancara dengan informan MY dari pemerintah kota Makassar untuk mengimplementasikan program minat baca di Kota Makassar melalui pendekatan pemrosesan informasi. Keberadaan perpustakaan dengan perpustakaan pada umumnya yang berisikan buku bahan-bahan bacaan untuk menambah minat baca.

Perpustakaan umum yang melaksanakan layanan kepada pelajar memberikan informasi kepada kelompok pelajar yang karena sesuatu hal, dapat menjangkau dalam perpustakaan sekolah. Tujuan perpustakaan sekolah agar pelajar dapat membaca dan memperoleh informasi (pengetahuan), sehingga

dengan membaca dan mendapat informasi itu akan menjadi siswa yang cerdas, mantap dan penuh kreasi.

Keberadaan perpustakaan di kota Makassar merupakan sebuah upaya dari pemerintah kota untuk melaksanakan implementasi program menambah minat baca bagi pelajar. Adanya program gemar membaca guna untuk memberikan bahan bacaan berkualitas bagi siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut demi pengembangan minat baca di kalangan pelajar.

“Salah satu program gemar membaca terbaik pemerintah kota Makassar, dimana segmen utamanya adalah taman kanak-kanak, pelajar sekolah dasar dan pelajar sekolah menengah pertama. Target sekolah yang dikunjungi setiap harinya sebanyak tiga sekolah dengan durasi waktu satu sampai tiga jam. Selain itu ketersediaan buku juga beragam, tidak seperti perpustakaan yang ada di ruang lingkup sekolah hanya menyediakan buku kurikulum sehingga sangat monoton bagi pelajar.” (Wawancara dengan MA Tanggal 20 September 2018).

Hasil wawancara dengan informan MA dapat disimpulkan mengupayakan adanya titik temu dengan sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan, yaitu bahan pustaka yang tersedia dapat memberi arti dan bantuan yang maksimal hingga dapat mengundang pelajar maupun individu untuk memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pelayanan perpustakaan yaitu menyediakan informasi tercetak yang terjangkau oleh pelajar dan individu.

Keberadaan gemar membaca di kota Makassar memberikan peluang baca bagi pelajar sangat besar, walau pada dasarnya target utama adalah pelajar namun sering kali pihak sekolah melakukan koordinasi dengan dinas perpustakaan untuk menambah minat baca bagi pelajar.

Salah satu unsur pokok perpustakaan adalah koleksi, koleksi bahan pustaka haruslah relevan dengan kebutuhan program gemar membaca demi terwujudnya sebuah kebijakan. Untuk memberikan pelayanan informasi dalam rangka mencapai tujuan perpustakaan sekolah harus berusaha untuk menyediakan berbagai informasi.

“Pada dasarnya setiap jenjang pendidikan mempunyai kategori tertentu terkait bahan pustaka yang ada didalam perpustakaan. Seperti jenjang taman kanak-kanak itu didalam perpustakaan harus diisi dengan banyak gambar-gambar karena diusia itu mereka senang dengan tampilan demikian..”(Wawancara dengan MW Tanggal 20 September 2018).

Hasil wawancara informan MW bahan pustaka untuk tingkat pelajar sekolah dasar merupakan acuan dalam proses memberikan bimbingan kepada para pengelola perpustakaan yang ada disekolah. Agar dapat melengkapi perpustakaan dengan bahan bacaan sesuai dengan tingkat usia pelajar sekolah dasar.

Perpustakaan mempunyai peran, tugas dan fungsi menghimpun, mengelola dan mengemas menyajikan dan memberdayakan informasi. agar bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan dapat berjalan dalam waktu yang lama perlu suatu penanganan agar bahan pustaka terhindar dari kerusakan. Pelestarian bahan pustaka melalui pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan agar koleksi bahan pustaka berdaya guna secara maksimal.

Kepala sekolah selaku yang bertanggung jawab atas segala aktifitas dalam kegiatan belajar mengajar disekolah sangat memperhatikan aspek pemeliharaan terhadap kualitas bahan bacaan, seperti halnya di sekolah dasar

Tanggul Patompo II. Beberapa upaya dilakukan agar kelestarian bahan pustaka tetap terjaga.

“Upaya pelestarian tentu dilakukan hal tersebut sangat berkaitan dengan bimtek yang dilakukan dinas perpustakaan. Beberapa aspek yang sangat kami perhatikan agar koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan sekolah ini tetap terjaga seperti pengelolaan, keuangan, cara penyimpanan buku, teknik dan metode serta kuantitas pengelola. Aspek-aspek tersebut harus diperhatikan sehingga saya bilang tadi memang perlu ada bimbingan pengelolaan karena itu sangat berkaitan dengan pelestarian bahan pustaka sendiri.”(Wawancara dengan SS 28 Maret 2019).

Hasil wawancara dengan informan SS proses bimbingan teknis terkait pengelolaan perpustakaan di sekolah juga berkaitan dengan pelestarian bahan pustaka yang ada, dengan pengelolaan yang baik tentu akan dibarengi dengan pelestarian bahan pustaka.

Pelestarian bahan pustaka merupakan salah satu hal penting bagi keberadaan perpustakaan selain pengadaan, pengolahan, dan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan. Keberadaan bahan pustaka yang patut dilestarikan merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan selain ruangan atau gedung, peralatan/perabot, tenaga, dan anggaran. Unsur-unsur tersebut satu sama lain saling berkaitan dan saling mendukung untuk terselenggaranya layanan perpustakaan yang baik.

Upaya yang dilakukan oleh SDN Tanggul Patompo I agar koleksi bahan bacaan yang ada tetap terjaga dengan baik juga melibatkan pelajar agar mau bekerjasama menjaga buku yang ada, tentu melibatkan pelajar selain agar

kelestarian bahan pustaka tetap terjaga juga menanamkan kepada pelajar untuk senantiasa merasa memiliki.

“Disuruh ki’ jagai buku yang dipinjam baik-baik kak, tidak boleh ki’ robek kalau ada anak-anak yang rusak buku nanti didenda sama bu guru. Perpustakaan sekolah ku kak harus lebih bagus dari perpustakaan sekolah yang lain, buku yang ada di perpustakaan itu buku kami semua anak sekolah disini, jadi harus dijagai kak, dari pada disuruh ki’ beli buku mahal harganya.”(Wawancara dengan SR 28 Maret 2019).

Hasil wawancara dengan SR dapat disimpulkan melibatkan pelajar dalam rangka menjaga bahan pustaka agar tetap terjaga merupakan sebuah metode yang dilakukan pada implementasi program pelestarian bahan pustaka. Rasa memiliki pelajar akan membuat mereka menjadi memiliki segala sesuatu yang ada didalam lingkungan sekolahnya begitu juga dengan perpustakaan.

Hasil observasi penulis dilapangan terkait informasi dalam gemar membaca dapat melestarikan bahan pustaka adalah melalui sebuah proses pembuatan program yang juga berisi tentang petunjuk pelaksanaan program. Dinas perpustakaan kota Makassar memberikan arahan kepada setiap perpustakaan sekolah tentang bagaimana mendesain sebuah perpustakaan agar menarik pelajar, selain itu mengisi perpustakaan dengan bahan pustaka yang sesuai dengan klasifikasi umur dari pelajar tingkat sekolah dasar.

3. Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsure lain dalam kehidupan dimana ia dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumber daya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen.

Pemerintah kota Makassar membuat serangkaian program dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca pelajar, salah satunya melalui program pemilihan duta baca ini merupakan sosok figuren yang mampu menjadi tauladan bagi masyarakat lain agar juga gemar membaca. Pemilihan duta baca juga tentunya tentunya melalui serangkaian proses untuk mengapresiasi pelajar yang gemar membaca.

Pemilihan duta baca kalangan pelajar di kota Makassar berlangsung setiap satu tahun, dimana setiap peserta harus melalui seleksi ketat sebelum terpilih menjadi duta baca. Duta baca di kota Makassar di bagi atas tiga klasifikasi, pertama tingkat SD, kedua tingkat SMP dan ketiga tingkat SMA. Para peserta melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh dewan juri seperti: tes tertulis, tes wawancara, dan orasi program jika terpilih jadi duta baca. Setelah itu dewan juri akan melakukan seleksi dan memilih yang terbaik di setiap klasifikasi peserta pelajar tersebut.

Pemerintah kota Makassar dalam rangka mengimplementasikan kebijakan peningkatan minat baca pelajar di kota Makassar dengan melalui program gemar membaca. Program gemar membaca merupakan bentuk apresiasi

pemerintah kepada pelajar yang gemar membaca. Selain itu juga merangsang kepada pelajar lain agar juga tertarik untuk membaca.

“program gemar membaca dalam tingkat pelajar sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas merupakan sebuah program kerja dinas perpustakaan kota Makassar. Kegiatan seperti ini akan dilakukan sesuai dengan perencanaan program kerja yang telah dibuat. Pemilihan duta baca seperti ini sangat penting, pelajar di kota Makassar ini butuh sosok figure yang dapat dijadikan contoh bagi pelajar-pelajar yang lain agar meningkatkan minat bacanya.”(Wawancara dengan MY 26 Maret 2019).

Hasil wawancara dengan MY program gemar membaca sebagai apresiasi kepada pelajar yang gemar membaca selain itu pemilihan duta baca sebagai tauladan bagi pelajar lain agar meningkatkan minat baca. Kalangan pelajar memang merupakan target terlebih membaca sangat disarankan bagi generasi penerus bangsa.

Berdasarkan data statistik minat baca masyarakat di Indonesia masih tergolong sangat rendah, sehingga perlu dilakukan sebuah program untuk meningkatkan minat bacapelajar. Kegiatan seperti sosialisasi pentingnya membaca dan memperluas ilmu pengetahuan sampai pada pemilihan duta baca merupakan sebuah kegiatan yang mendorong minat baca pelajar, terlebih dengan kemudahan akses yang dimiliki sekarang.

Dalam gemar membaca diharapkan mampu memotivasi bagi pelajar yang lain untuk meningkatkan minat baca pelajar. Selain itu keberadaan duta baca pelajar di kota Makassar mempunyai fungsi mensosialisasikan dan mendukung segala bentuk program dinas perpustakaan kota Makassar.

“Gerakan Makassar gemar membaca tentu membutuhkan dukungan dari semua pihak. Beberapa program telah dilaksanakan untuk meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar terlebih kepada kelompok pelajar yang menjadi harapan bangsa dimasa yang akan datang. Tentu dengan adanya program gemar membaca seperti ini dapat menjadi brand ambassador untuk mempromosikan kegiatan dinas perpustakaan.” (Wawancara dengan MA 26 Maret 2019).

Hasil Wawancara dengan informan MA dapat disimpulkan gemar membaca dalam meningkatkan minat baca pelajar dikota Makassar dan sebagai sebuah bentuk promosi dinas perpustakaan kota Makassar kepada pelajar dan masyarakat agar yang menjadi tujuan dalam meningkatkan minat baca di kota Makassar dapat tercapai.

Tugas utama dalam program ini sebagai motivator peningkatan minat baca pelajar, serta sebagai pengungkit atau memperkuat kegiatan perpustakaan dalam mengkampanyekan Gerakan Nasional Pembudayaan Kegemaran Membaca. Seorang Duta Baca juga mampu menjadi panutan dan memperkuat kegiatan serupa yang diselenggarakan oleh daerah.

Kegiatan gemar membaca dalam tingkat pelajar di kota Makassar sebagai bentuk implementasi dari peningkatan minat baca masyarakat khususnya pelajar dikota Makassar. Kegiatan tersebut terbukti dapat meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar dengan apresiasi dari pelajar yang begitu besar untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

“Menjadi duta baca merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi pelajar. Program gemar membaca rutin dilaksanakan dan keterlibatan pelajar terus meningkat. Bahkan ada beberapa sekolah yang memang membekali siswanya agar siap menjadi duta baca. Program-program

seperti ini menjadi acuan bagi kami guna meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar.”(Wawancara dengan MW 26 Maret 2019).

Hasil wawancara dengan informan MW dapat disimpulkan program pemilihan gemar membaca sebagai ajang implementasi kebijakan peningkatan minat baca pelajar di kota Makassar. Kegiatan gemar membaca sangat berpengaruh dalam peningkatan minat baca pelajar di kota Makassar.

Budaya membaca datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan motivasi minat pelajar untuk meningkatkan minat bacanya. Program ini tentu harus melakukan sebuah kegiatan yang membangun agar mampu mengajak pelajar yang lain untuk meningkatkan budaya gemar membaca.

Ditengah kurangnya minat baca di Indonesia, Dinas Perpustakaan Makassar menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai motivasi pelajar khususnya di kota Makassar untuk rajin membaca. Duta baca pelajar selain sebagai pemantik agar meningkatnya minat baca pelajar di kota Makassar juga harus menjadi contoh sebagai pelajar yang baik.

“Kegiatan program ini untuk meningkatkan minat baca dalam tingkat pelajar SD yang dilaksanakan oleh dinas perpustakaan kota Makassar memberikan motivasi bagi siswa-siswi kami untuk lebih giat lagi membaca. Saya sebenarnya melihat kecendrungan peningkatan membaca itu karena mereka juga ingin menjadi duta baca.Tapi bagi saya tidak ada masalah berawal dari sini nantinya mereka akan terbiasa membaca.”(Wawancara dengan SS 28 Maret 2019).

Hasil wawancara dengan informan SS dapat dilihat sebagai sebuah konsep dalam mengimplementasikan peningkatan minat baca pelajar di kota Makassar. Pelajar tentu akan termotivasi untuk menjadi duta baca dan untuk mencapai tujuan tersebut tentu mereka akan terbiasa dengan membaca.

Sumber daya merupakan faktor strategis dalam pelaksanaan kegiatan institusi atau organisasi untuk mencapai tujuan dalam gemar membaca tingkat pelajar serta peranan yang berperan terhadap proses pembelajaran. Perpustakaan sekolah masih memanfaatkan guru yang ada dengan diberikan tugas tambahan sebagai penanggung jawab.

“perpustakaan disekolah tampak tidak dikelola dengan baik, diantaranya kurangnya perhatian dari pimpinan sekolah, dan masalah-masalah lain yang mempengaruhi terhadap rendahnya keinginan dalam pelayanan perpustakaan terhadap kepentingan pembelajaran”(Wawancara RS 21 Juni 2019).

Hasil wawancara dengan RS dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi terhadap pengembangan sumber daya perpustakaan sekolah tentunya para pengambilan keputusan untuk meningkatkan gemar membaca ini perlu memahami bagaimana sebaiknya melakukan proses rekrutmen untuk mencapai suatu tujuan.

Upaya meningkatkan gemar membaca di jajaran pelajar dapat ditempuh melalui pembentukan duta baca yang berperan sebagai *peer leadership*, sekelompok siswa yang mampu memberikan contoh perilaku gemar membaca. Adanya contoh riil yang diberikan oleh teman sebayanya, menjadikan peserta didik lainnya meniru perilaku baik yang telah dipraktikkan

oleh temannya. Tentunya, sebelum perilaku gemar membaca di kalangan duta baca terbentuk, teladan guru dan kepala sekolah dalam gemar membaca menjadi suatu hal yang utama dan penting untuk disuguhkan kepada peserta didik.

Pelajar sekolah dasar Tanggul Patompo I mengakui hasratnya ingin menjadi duta baca untuk membanggakan sekolah dan orang tua. Sehingga upaya yang dilakukan dengan meningkatkan bahan bacaan setiap harinya. Proses yang ditempu setiap pelajar untuk menjadi duta baca tentu melalui mekanisme pemilihan, para pelajar harus berkompetisi dengan duta-duta yang lain.

“Saya sangat berminat kak menjadi duta baca, mau ka’ buat bangga sekolah ku sama orang tua ku juga. Sering ji’ kak bilang guru jangan rajin membaca karena mau ta’ ji jadi duta baca, rajinlah membaca supaya pintar. Tapi tetap ji ka’ berusaha kak, semoga bisa ka’ terpilih jadi duta baca.” (Wawancara dengan AD 28 Maret 2019).

Hasil wawancara dengan AD dapat dilihat hasrat pelajar sangat termotivasi ingin menjadi duta baca pelajar di kota Makassar, namun mereka sepenuhnya memahami bahwa realitas dalam membaca untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bukan untuk menjadi seorang duta baca. Tentu dalam hal ini peran guru sangat penting dalam memberikan bimbingan kepada setiap pelajar.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dapat disimpulkan Terkait implementasi kebijakan dalam sumber daya peningkatan minat baca pelajar di kota Makassar melalui program pemilihan duta baca merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh dinas perpustakaan kota Makassar untuk meningkatkan minat baca para pelajar. Pemilihan duta baca sendiri juga

diharapkan mampu untuk mempromosikan dan mengajak para pelajar di kota Makassar terkait bentuk program dinas perpustakaan kota Makassar dalam upayanya meningkatkan minat baca pelajar.

4. Struktur Organisasi

Menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak atau hasil implementasi kebijakan itu sendiri.

Kendala yang menghambat penerapan implementasi di dinas perpustakaan adalah tingginya target kerja yang harus dicapai sedangkan, kualitas Sumber Daya Manusia masih rendah. Dinas Perpustakaan ini menerapkan prinsip kerja dan pembagian kerja yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab serta selalu bertanggung jawab dengan bahan kerja yang diberikan.

“Sejauh ini kendala yang menghambat dalam penerapan prinsip struktur organisasi adalah target kerja yang harus dicapai oleh setiap pegawai perpustakaan, selain itu usaha yang bisa dilakukan khususnya bagian referensi yaitu selalu berusaha memberikan layanan yang terbaik kepada pemustaka, dan menempatkan kepentingan umum”(Wawancara dengan MY 26 Maret 2019).

Wawancara dengan informan MY dapat disimpulkan bahwa Yang menghambat dalam terbatasnya Sumber Daya Manusia, telah menerapkan sistem otomatis perpustakaan akan tetapi pegawai perpustakaan masih banyak

yang belum bisa mengoprasikan sistem yang diterapkan tersebut, serta usaha yang dapat dilakukan adalah melakukan pelatihan dan studi banding dan melihat bagaimana mereka harus mengembangkan perpustakaan sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing.

Dalam struktur organisasi perpustakaan yang akan menjadi tempat dibangunnya sebuah sistem keorganisasian dan merupakan kompetensi yang dimiliki oleh setiap perpustakaan akan menunjukkan kualitas dan sangat penting untuk mengetahui tingkat manajemen sebuah perpustakaan. Perpustakaan juga dapat diperuntukkan bagi pelajar, dengan pentingnya struktur organisasi perpustakaan untuk meninjau isi dari sebuah perpustakaan sehingga dapat dipastikan berjalan dengan fungsinya.

“kalau berbicara struktur organisasi bagaimana implementasi dari sebuah perpustakaan, kita bisa mendapatkan informasi tentang pengelolaan dari sebuah perpustakaan. Dalam hal ini kita dapat memudahkan untuk melakukan sebuah fungsi control, tentang apa saja yang mesti dilengkapi dan apa kekurangan didalam perpustakaan apakah itu sudah benar atau masih perlu diperbaiki.itu semua harus di analisis”(Wawancara MA 26 Maret 2019).

Hasil wawancara dengan MA struktur organisasi perpustakaan berisi muatan informasi yang bisa menjadi tolak ukur target dari implementasi kebijakan peningkatan minat baca pelajar sudah tercapai atau belum. Dalam kasus ini bertujuan menjadi bahan evaluasi dari dinas perpustakaan agar apa menjadi tujuan dari sebuah kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Pentingnya struktur organisasi perpustakaan sebagai penyampaian kepada pengunjung perpustakaan terkait manajemen dalam sebuah

perpustakaan. Diera globalisasi sekarang ini pada dasarnya ada banyak rujukan pelajar untuk mendapatkan sebuah informasi. Peningkatan minat baca tentu harus sesuai dengan daya tarik perpustakaan agar pengunjung dapat mengetahui buku apa saja yang terdapat didalam sebuah perpustakaan.

Peningkatan minat baca pada kalangan pelajar juga dapat menjadi visi dari setiap guru yang ada disekolah. Para guru mewajibkan kepada setiap muridnya untuk senantiasa membaca buku yang terkait dengan kurikulum. Melalui struktur perpustakaan dapat bertanggung jawab dalam sebuah pelajar yang dapat ikut mengontrol peredaran buku yang ada diperpustakaan.

“setiap perpustakaan wajib memiliki struktur organisasi, yang dapat membuat saya mampu mengontrol kebutuhan dari perpustakaan. Kami berupaya menyediakan berbagai buku keperluan yang terkait dengan pelajar dengan seperti itu tidak lagi dipersulit dengan harus membeli buku karena sudah ada didalam perpustakaan. Selain itu dapat juga berkaitan tentunya dengan pelestarian bahan pustaka. Tentunya dengan struktur perpustakaan juga menjadi nilai bagi sebuah institusi pendidikan agar menarik pelajar menuntut ilmu”(Wawancara MW 28 Maret 2019).

Hasil wawancara dengan MW dapat dilihat dari ketersediaan informasi perpustakaan melalui struktur organisasi merupakan sebuah acuan dalam upaya memberikan ketersediaan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pelajar. Selain itu perpustakaan yang baik juga sebagai tolak ukur baiknya pengelolaan dalam sebuah institusi pendidikan.

Struktur organisasi perpustakaan kenyataannya menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata dan dapat merupakan langkah implementasi kebijakan yang ditempuh dinas perpustakaan sekolah. Kebutuhan

akan informasi perpustakaan sangat penting guna meningkatkan minat baca pelajar. Terkhususnya pelajar tingkat sekolah dasar akan keberadaan dalam bahan bacaan yang terdapat diperpustakaan sekolah sangat membantu dalam peningkatan minat baca pelajar.

“struktur perpustakaan itu sangat penting, mulai dari ketersediaan buku sampai dengan apa saja yang masih kurang didalam sebuah perpustakaan sekolah. Sehingga kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi kekurangan dari sebuah perpustakaan sekolah serta harus dilengkapi dalam ketersediaan perpustakaan sekolah. Kecenderungan pelajar tingkat sekolah dasar mengharapkan pelajar dapat berkreasi didalam perpustakaan selama itu dalam kegiatan yang positive tentu perlu arahan dan bimbingan”(Wawancara RW 21 Juni 2019).

Hasil wawancara dengan RW struktur organisasi sangat penting untuk menentukan daya tarik perpustakaan. Perpustakaan sekolah harus dilengkapi dengan kebutuhan pelajar sehingga pelajar dapat nyaman ketika berada dalam perpustakaan serta menjadi tempat dibangunnya sebuah sistem struktur organisasi perpustakaan sekolah.

Berdasarkan hasil observasi penulis terkait struktur organisasi perpustakaan sekolah dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan gemar membaca pelajar mengacu pada upaya pengelolaan dalam sebuah perpustakaan sekolah menjadi sumber informasi dimana sebuah informasi sangat dibutuhkan dalam kemajuan perpustakaan sekolah.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Implementasi Program Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Pemaparan faktor-faktor yang melatarbelakangi proses implementasi kebijakan sesuai dengan teori Winter dalam (Peters and Pierre 2003) mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni :

1. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi;
2. Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah control politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional
3. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakanyang dibuat.

Kebijakan pemerintah kota Makassar dalam meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk memberikan pengetahuan sejak dini kepada para pelajar khususnya pelajar tingkat sekolah dasar (SD) yang menjadi fokus dalam penelitian. Pada dasarnya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan implementasi

kebijakan dalam meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar, ada faktor yang mendukung dan ada pula faktor yang menghambat. Sesuai dengan teori winter dalam (Peters and Pierre 2003) maka penulis jabarkan faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan dalam meningkatkan minat baca pelajar dikota Makassar sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Koordinasi antar organisasi yang baik

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi merupakan kegiatan untuk mengimbangi dan menggerakkan tim dengan membeikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas perpustakaan kota Makassar dalam upayanya mengimplementasikan kebijakan peningkatan minat baca pelajar di kota Makassar selalu berkoordinasi dan membangun kerjasama dengan beberapa dinas terkait seperti dinas pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyentuh kalangan pelajar.

“Tentunya jika ada program kami yang berkaitan dengan pelajar kami harus membangun koordinasi terlebih dahulu dengan dinas pendidikan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, begitupun sebaliknya. Seperti sebut saja misalnya kegiatan lomba membaca tingkat pelajar itu kami menjalin kerjasama antara dinas pendidikan dan juga pihak sekolah.

Tentu dengan adanya hubungan seperti ini pihak kami mengharapkan dapat lebih menumbuhkan gemar membaca di tingkat pelajar di kota Makassar.” (Wawancara dengan MY Tanggal 26 Maret 2019)

Wawancara dengan MY dapat disimpulkan adanya koordinasi antara dinas perpustakaan dan dinas pendidikan kota Makassar dalam upaya meningkatkan minat baca dikalangan pelajar merupakan sebuah bentuk hubungan yang baik demi terimplementasikannya kebijakan gemar membaca khususnya di kota Makassar.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Bentuk koordinasi tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan yang bertajuk tentang pelajar, namun ada juga program dinas perpustakaan kota Makassar yang memang pihak sekolah harus terlebih dahulu membangun komunikasi dengan dinas perpustakaan kota Makassar dalam melaksanakannya seperti kegiatan dongeng keliling.

“Kegiatan dongeng keliling seperti yang saya bilang sebelumnya itu harus dikoordinasikan dengan pihak kami terlebih dahulu baru kemudian dapat dilaksanakan setelah penentuan waktu dan tempat. Kita tetap mempunyai target sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program dongeng keliling, namun ada kadang kalanya sekolah mempunyai rutinitas yang juga tidak dapat diganggu seperti misalnya ulangan ataupun ujian. Tentu dengan kondisi seperti ini pihak sekolah harus terlebih dahulu membangun

koordinasi dengan kami agar kegiatan program dongeng keliling dapat terlaksana dengan baik.” (Wawancara dengan MW Tanggal 26 Maret 2019))

Hasil wawancara dengan MW dapat disimpulkan dalam pelaksanaan kegiatan dongeng keliling memang dibutuhkan koordinasi antara pihak sekolah yang ingin mengadakan program dongeng keliling dengan pihak perpustakaan kota Makassar, hal ini sangat penting agar tidak terjadi tabrakan antara kegiatan sekolah dan juga dinas perpustakaan kota Makassar itu sendiri.

Koordinasi antar lembaga tidak hanya sebagai upaya untuk berjalannya sebuah kegiatan namun sebagai langkah untuk memastikan sebuah kebijakan dapat terimplementasikan dengan sasaran dan tujuan yang tepatsesuai dengan perencanaan.

Ruang lingkup perpustakaan yang merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari dinas perpustakaan kota Makassar termasuk dalam rangka penyediaan buku bacaan yang berkualitas di setiap perpustakaan di sekolah membuat perlu adanya koordinasi antara pihak perpustakaan sekolah dengan perpustakaan kota Makassar.

“Koordinasi sebenarnya tidak hanya berbicara tentang kegiatan saja, namun juga fokus pada program lain seperti pengadaan buku diperpustakaan sekolah. Seperti banyak buku yang memakai kurikulum lama pihak perpustakaan sekolah harus melaporkan kepada kami agar buku tersebut ditarik dan digantikan dengan buku sesuai kurikulum yang ada, maka dari itu selain bentuk pengkoordinasian tadi juga ada program kunjungan kesetiap perpustakaan sekolah setiap minggunya yang dilakukan oleh aparatur kami.” (Wawancara dengan MA Tanggal 26 Maret 2019)

Hasil wawancara dengan informan MA dapat disimpulkan bentuk koordinasi yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut tentang keberadaan buku di setiap perpustakaan sekolah yang mengandung unsur pelajaran kurikulum yang sudah tidak terpakai sehingga perlu ada koordinasi antara pihak perpustakaan sekolah dengan pihak perpustakaan kota Makassar.

b. Respon Positif dari Pelajar

Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses dan wujud partisipasi politik masyarakat di dalam kehidupan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat akan menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Besarnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat di dalam suatu Negara. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik menunjukkan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah akan sesuai dengan kehendak masyarakat.

Serangkaian program yang dilakukan oleh dinas perpustakaan kota Makassar dalam mewujudkan Makassar gemar membaca mendapat dukungan dari masyarakat utamanya kaum pelajar. Dukungan tersebut memberikan

motivasi kepada pelaku kebijakan untuk senantiasa berinovasi dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang semakin menumbuh kembangkan minat baca para pelajar di kota Makassar.

“Beberapa program yang kami lakukan seperti dongeng keliling, lomba membaca, dan sosialisasi-sosialisasi di tingkat sekolah itu mendapat respon positive utamanya dari kaum pelajar sebagai sasaran utama dari kebijakan Makassar gemar membaca. Dengan demikian tolak ukur sebuah kebijakan dikatakan sukses apa bila itu sesuai dengan keinginan pelaku kebijakan. Sehingga harapan besar kami kemudian kegiatan-kegiatan dinas perpustakaan kota Makassar terus mendapat dukungan dari masyarakat sehingga budaya membaca di kota ini terus dapat berkembang.” (Wawancara dengan MY Tanggal 26 Maret 2019)

Wawancara dengan informan MY dapat disimpulkan bahwa penerimaan masyarakat khususnya kalangan pelajar terhadap program dinas perpustakaan kota Makassar guna meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar sebagai sebuah kebijakan dapat terimplementasi dengan baik. Keberhasilan sebuah kebijakan tentu ketika kebijakan tersebut mendapat respon positive dari sasaran kebijakan.

Respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu. Respon merupakan reaksi, artinya pengiyaan atau penolakan, serta sikap acuh tidak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator oleh pesannya.

Menumbuhkan gerakan Makassar gemar membaca pada kalangan pelajar yang merupakan target atau sasaran dari sebuah program-program yang dilaksanakan oleh dinas perpustakaan kota Makassar merupakan sebuah

langkah kongkrit dalam memberi bekal ilmu pengetahuan kepada kalangan pelajar. Keberhasilan program-program guna meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar tidak terlepas dari partisipasi para pelajar dalam mendukung berbagai program yang dicanangkan.

“Tentunya untuk mengetahui sebuah kebijakan atau agenda itu berjalan dengan baik adalah dengan melihat partisipasi dari pelajar. Saya melihat partisipasi masyarakat khususnya kalangan peserta didik dalam mendukung program-program kami sangat banyak hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan itu selalu dinanti oleh para pelajar bahkan kami memberikan kesempatan bagi setiap masyarakat atau para guru agar senantiasa memberikan saran kepada kami tentang apa saja yang menjadi kebutuhan dari para pelajar sehingga dapat kami sinkronkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.” (Wawancara dengan MW Tanggal 26 Maret 2019)

Hasil wawancara dengan MW dapat disimpulkan partisipasi peserta didik dalam mendukung setiap kegiatan dinas perpustakaan kota Makassar membuat kebijakan dapat diimplementasikan secara maksimal. Untuk terus meningkatkan minat baca para peserta didik pelaku kebijakan senantiasa menerima saran dan usulan program untuk para pelajar demi semakin meningkatkan minat baca para peserta didik.

Respon atau tanggapan adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada. jika proses pengamatan sudah berhenti, dan hanya tinggal kesan-kesan saja, peristiwa sedemikian ini disebut tanggapan. Dalam hal ini untuk mengetahui respon masyarakat dapat dilihat melalui persepsi, sikap, dan partisipasi. Respon pada prosesnya didahului sikap seseorang, karena sikap

merupakan kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku ketika menghadapi suatu rangsangan tertentu.

Setiap pelajar di SDN Tanggul Patompo I senantiasa menantikan kegiatan-kegiatan dari dinas perpustakaan kota Makassar, selain karena menyediakan bahan bacaan yang menarik juga penyampaian edukasinya berbeda dengan dikelas setiap harinya yang terkesan sangat formal.

“Saya sama teman-teman ku kak bahagia sekali kalau ada itu perpustakaan keliling, jadi kalau ada penyampaian dari guru kalau besok ada perpustakaan keliling pasti biar sakit dipaksa ji masuk sekolah. Sebenarnya sama-sama ji belajar cuma lebih asyik dirasa kalau ada perpustakaan keliling karena tidak belajar didalam kelas ki tapi dilapangan terus banyak juga teman-teman dari kelas lain bukan kelas ku saja.” (Wawancara dengan AD Tanggal 28 Maret 2019)

Hasil wawancara dengan informan SR dapat disimpulkan bahwa kecendrungan pelajar lebih senang dalam menerima ilmu pengetahuan di ruang terbuka dibanding didalam kelas atau ruangan yang cenderung monoton. Selain itu belajar sambil bermain membuat para pelajar dapat menerima pengetahuan jauh lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait faktor pendukung pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar dapat dilihat dari dua faktor yaitu koordinasi antar organisasi yang baik dan respon positive dari para pelajar. Koordinasi antar organisasi sangat penting dalam melaksanakan program terlebih memang dibutuhkan kerjasama yang baik untuk pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya partisipasi pelajar dalam pelaksanaan program dinas pendidikan

kota Makassar yang positive dapat disimpulkan sebagai sebuah keberhasilan implementasi dalam melaksanakan kebijakan peningkatan minat baca pelajar di kota Makassar.

2. Faktor Penghambat

a. Kekurangan SDM

Alasan utama adanya program gemar membaca untuk meningkatkan minat baca pelajar. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan berbagai macam tugas. Berbagai macam tugas itu tentu saja berbeda-beda, dan tugas-tugas itu harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Supaya bisa efektif dan efisien, tugas-tugas itu harus dilakukan oleh orang atau pelaksana yang tepat, yang memiliki kemampuan sesuai dengan beban tugas yang harus dilaksanakan, sehingga para pelaksana memiliki dorongan atau motivasi yang tinggi untuk menjalankannya. Selain dipengaruhi oleh adanya kesesuaian dengan kemampuan, juga harus sesuai dengan ganjaran yang diterima, dan tidak ada hambatan-hambatan yang serius dalam pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain.

Kendala yang dihadapi dinas perpustakaan kota Makassar dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan minat baca pelajar di kota Makassar terlebih dalam pelaksanaan program adalah kurangnya tenaga operasional yang bekerja dilapangan. Kekurangan tersebut sangat mempengaruhi kegiatan pelaksanaan program.

“Saya melihat kendala kami sejauh ini dalam pelaksanaan program yang ada terdapat pada kekurangan tenaga operasional yang bertugas setiap harinya. Kekurangan tenaga operasional ini terbukti menghambat beberapa program seperti perpustakaan keliling, dongeng keliling dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam perjalanannya memang pihak kami selalu bekerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu baik dari SKPD dan lembaga-lembaga edukatif. Namun tetap saja menghambat karena mereka juga mempunyai tanggung jawab dan juga program di lembaga mereka.” (Wawancara dengan MY Tanggal 26 Maret 2019)

Hasil wawancara dengan Informan MY dapat disimpulkan kekurangan tenaga operasional dapat menghambat kegiatan pelaksanaan program-program dinas perpustakaan kota Makassar. Tentu dalam mengimplementasikan program yang mempunyai target banyak tentu harus dibutuhkan jumlah tenaga operasional yang banyak pula.

Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam organisasi. Dalam pengertian sumber daya manusia, yang diliput bukanlah terbatas kepada tenaga ahli, tenaga pendidikan ataupun tenaga yang berpengalaman saja tetapi semua tenaga kerja yang digunakan organisasi untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.

Kebijakan kota Makassar dalam meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar dalam pelaksanaannya memang membutuhkan banyak orang. Dalam perjalanannya dinas perpustakaan kota Makassar telah mengajukan

penambahan pegawai untuk mengisi beberapa sektor namun hal tersebut masih menunggu persetujuan karena harus disesuaikan dengan APBD kota Makassar.

“Harus diakui memang dinas kami sangat kekurangan pegawai, kekurangan bukan dalam kegiatan administrative yang ada tetapi lebih kepada kami sangat membutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan program yang ada, pihak kami telah mengusulkan penambahan pegawai namun sejauh ini masih belum ditanggapi karena penambahan tersebut harus disesuaikan dengan pendapatan APBD kota Makassar. Tentu kedepan kami mengharapkan ada penambahan-penambahan pada sektor tertentu.”(Wawancara dengan MA Tanggal 26 Maret 2019).

Hasil wawancara dengan MA dapat disimpulkan bahwa kekurangan pegawai di beberapa sektor menjadi kendala dalam pelaksanaan program yang ada, penambahan operasional pegawai belum dilakukan karena memang dalam instansi pemerintah kota keberadaan pegawai harus sesuai dengan APBD kota Makassar.

Pembahasan terkait manajemen sumber daya manusia menjadi suatu bahasan yang menjadi suatu proses sistematis dan terstruktur untuk menjalankan segala proses pengelolaan yang ada di dalam suatu lingkungan organisasi. Dengan memiliki pengelolaan yang tersistem maka organisasi memiliki tujuan yang ingin di capai dan di realisasikan melalui pengelolaan sumber daya manusia.

Terhambatnya beberapa program yang telah di canangkan oleh dinas perpustakaan kota Makassar tidak terlepas dari kekurangan struktur pegawai yang dimiliki. Kendala seperti ini memang merupakan kendala yang umum terjadi pada suatu instansi terlebih dalam menjaring orang-orang yang akan

mengisi sektor yang kosong harus sesuai dengan kriteria kebutuhan dari institusi.

“Kalau hanya sekedar merekrut pegawai sebenarnya ada banyak orang yang mau bergabung bersama kami dalam menyukseskan program-program dinas perpustakaan kota Makassar. Tetapi tentu instansi ini juga harus memiliki proses penjurangan yang ketat tidak asal menerima pegawai. Kami memang mencari pegawai yang benar-benar bisa melaksanakan program yang ada. Percuma jika melakukan perekrutan namun ternyata tidak bisa melaksanakan ataupun berkreasi dengan program-program yang telah di rencanakan.”(Wawancara dengan MW Tanggal 26 Maret 2019)

Hasil wawancara dengan informan MW dapat penulis simpulkan bahwa SDM tidak hanya berbicara tentang kuantitas namun juga berbicara tentang kualitas. Kebutuhan pegawai yang mempunyai skill memang menjadi prioritas dari semua instansi hal ini sangat beralasan demi terciptanya tujuan yang diinginkan.

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana organisasi mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung menunjang proses terlaksananya tujuan organisasi. Prasarana mencakup semua perlengkapan dan peralatan yang secara tidak langsung menunjang proses terlaksananya tujuan organisasi.

Tingginya partisipasi pelajar terhadap kegiatan perpustakaan keliling pada dinas perpustakaan kota Makassar tidak didukung dengan jumlah kendaraan operasional. Keberadaan mobil perpustakaan keliling yang masih sangat minim membuat jadwal perpustakaan keliling harus di sinkronkan dengan permintaan setiap sekolah.

“Faktor yang menjadi kendala selanjutnya dari kami adalah kekurangan mobil operasional yang digunakan pada program perpustakaan keliling, sampai tahun 2018 jumlah mobil perpustakaan keliling hanya sebanyak 3 (Tiga) unit, dengan total sekolah di kota Makassar 1.078 unit. Tentu dengan jumlah kendaraan operasional yang ada sekarang sangat tidak memungkinkan untuk mencakup keseluruhan sekolah di kota Makassar,” (Wawancara dengan MY Tanggal 26 Maret 2019)

Hasil wawancara dengan informan MY ketersediaan kendaraan operasional yang digunakan dalam menjalankan program perpustakaan keliling masih sangat minim dan tidak dapat menjangkau keseluruhan sekolah yang berada di kota Makassar.

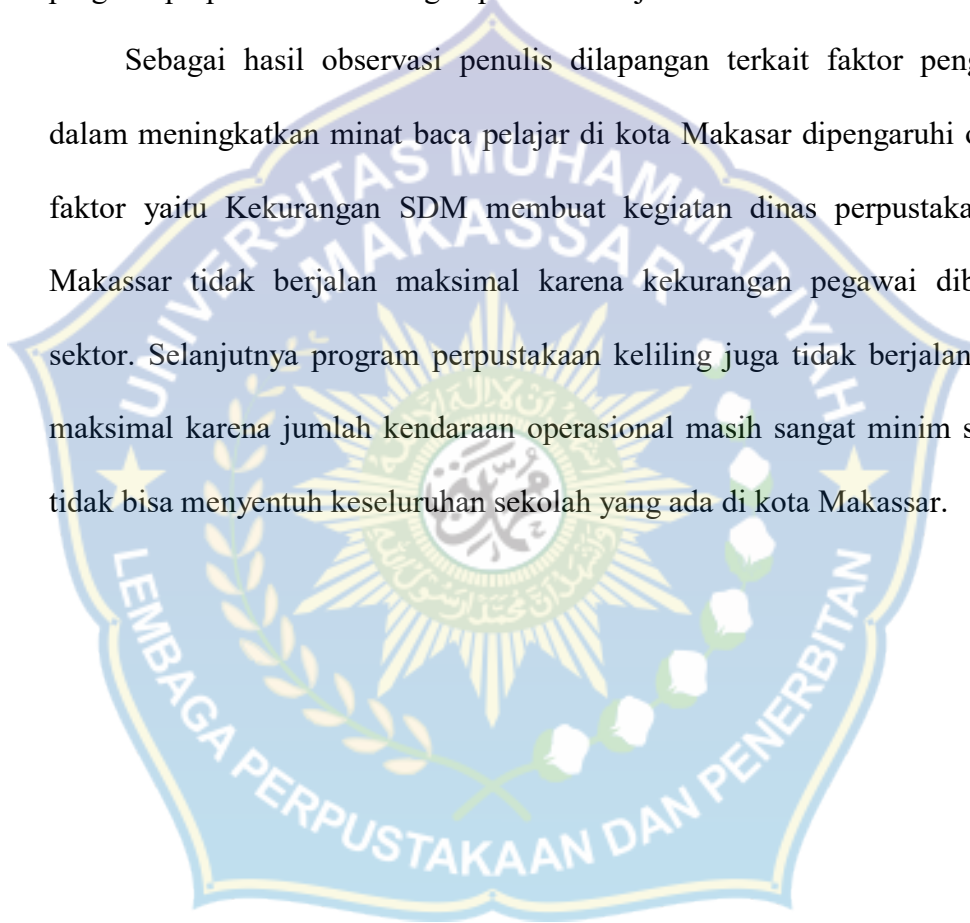
Sarana merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam proses pencapaian tujuan organisasi, seperti gedung, ruangan, komputer, serta media lainnya. Adapun prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pelaksanaan organisasi seperti rak buku, data pengunjung, dan jalan.

Dongeng keliling *with library mobile* merupakan salah satu inovasi pemerintah kota Makassar melalui dinas perpustakaan kota Makassar. Keberadaan perpustakaan keliling menjadi sarana yang membawa perpustakaan kepada pelajar, keberadaan perpustakaan keliling yang masih sangat minim memang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah kota.

“Perpustakaan keliling itu salah satu bentuk inovasi yang dilakukan pemerintah kota Makassar, tentu kedepan kami mengharapkan ada tambahan mobil operasional. Sejah ini memang mobil yang ada adalah bentuk bantuan bukan dari hasil belanja daerah. Sehingga kami mengharapkan ada kerjasama dari semua pihak untuk memaksimalkan perpustakaan keliling ini agar terus berlanjut.” (Wawancara dengan MA Tanggal 26 Maret 2019)

Hasil wawancara dengan informan MA dapat disimpulkan adanya harapan dari dinas perpustakaan kota Makassar agar semua pihak saling bekerjasama guna memikirkan penambahan kendaraan operasional agar program perpustakaan keliling dapat terus berjalan.

Sebagai hasil observasi penulis dilapangan terkait faktor penghambat dalam meningkatkan minat baca pelajar di kota Makasar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Kekurangan SDM membuat kegiatan dinas perpustakaan kota Makassar tidak berjalan maksimal karena kekurangan pegawai di beberapa sektor. Selanjutnya program perpustakaan keliling juga tidak berjalan dengan maksimal karena jumlah kendaraan operasional masih sangat minim sehingga tidak bisa menyentuh keseluruhan sekolah yang ada di kota Makassar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis dilapangan terkait Implementasi Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar maka ditarik sebuah kesimpulan dengan indikator sebagai berikut:

1. Disposisi : Terkait upaya Program Gerakan Makassar Gemar Membaca di kota Makassar dapat merealisasikan gemar membaca bagi pelajar dengan melaksanakan kegiatan dan melakukan berbasis edukasi juga penyediaan sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dari pengunjung utamanya pelajar.
2. Komunikasi : Terkait informasi dalam gemar membaca dapat melestarikan dalam Program Gerakan Makassar Gemar Membaca serta memberikan arahan kepada setiap perpustakaan tentang bagaimana mendesain sebuah perpustakaan agar pelajar dapat menarik.
3. Sumber Daya : Implementasi kebijakan dalam sumber daya peningkatan minat baca pelajar melalui Program Gerakan Makassar Gemar Membaca salah satu upaya yang ditempuh oleh Dinas Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca para pelajar.
4. Struktur Organisasi : Terkait struktur organisasi perpustakaan sekolah dalam implementasi kebijakan untuk meningkatkan gemar membaca

pelajar mengacu pada upaya pengelolaan dalam sebuah perpustakaan sekolah menjadi sumber informasi sangat dibutuhkan dalam kemajuan perpustakaan sekolah.

5. Faktor Pendukung : pelaksanaan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar koordinasi antar organisasi sangat penting dalam melaksanakan program terlebih dibutuhkan kerjasama yang baik untuk pelaksanaan kebijakan. Partisipasi pelajar dalam pelaksanaan program dinas pendidikan kota Makassar yang positive.
6. Faktor Penghambat : Faktor penghambat adalah implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan minat baca pelajar di kota Makassar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kekurangan SDM dan kekurangan sarana dan prasarana . Kekurangan SDM membuat kegiatan dinas perpustakaan kota Makassar tidak berjalan maksimal karena kekurangan pegawai di beberapa sektor. Selanjutnya program perpustakaan keliling juga tidak berjalan dengan maksimal karena jumlah kendaraan operasional masih sangat minim sehingga tidak bisa menyentuh keseluruhan sekolah yang ada di kota Makassar.

B. Saran

Saran penulis terkait hasil penelitian tentang Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar diharapkan kepada pemerintah untuk memperbanyak kerjasama dengan komunitas-komunitas

yang mendukung kegiatan gemar membaca. Diharapkan kepada pihak pengelola untuk menambah jumlah perpustakaan keliling demi menambah minat baca bagi pelajar di kota Makassar. Serta kepada pelajar agar senantiasa meningkatkan minat baca untuk menambah pengetahuan dan tidak akan pernah bosan dalam membaca untuk meningkatkan minat baca. .



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Kebijakan.....	6
B. Konsep Kebijakan Publik.....	10
C. Konsep Implementasi Kebijakan	12
D. Kebijakan Pemerintah Daerah.....	20
E. Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Minat Baca	23
F. Kerangka Pikir	23
G. Fokus Penelitian.....	28
H. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
BAB III	
METODE PENELITIAN	

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisa Data.....	32
G. Pengabsahan Data	33

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
B. Implementasi Program Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca Di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar	46
C. Faktor Yang Melatarbelakangi PelaksanaanProgram Pemerintah Gerakan Makassar Gemar Membaca Di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.....	75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. PT. Bumi Aksara:Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta:Bandung.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori, dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Berkah, Buana. 2008. *Perpustakaan sebagai sarana meningkatkan minat baca siswa*.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara:Jakarta.
- Landriany, Ellen. 2014. *Implementasi Kebijakan Dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan*. Vol.2, No.1.
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group:Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. PT. elex Media Komputindo:Jakarta.
- Ramadhani, Abdullah. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Vol.11, No.01.
- Shaleh, Abdul Rahman. 2009. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta:Kencana
- Suranto.2014. *Implementasi Kebijakan Anotonomi Pelayanan Pendidikan*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Sutini.2010. *Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa*. *Kependidikan Interaksi*. Vol.5, No.(5):56-64.
- Sugiyono.2013. *metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung:Alfabeta.

Sugiyono.2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tahjan, H.2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung.

Tangkiilisan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik (konsep, strategi, dan proses)*.
Yogyakarta:Lukman Offset YPAPI.

Thoha, M. 2012. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta:Raja
Grafindo Perseda.

Undang-undang No.43 tahun 2007 *Perpustakaan* Pasal 50.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional*. Pasal 26 Ayat 1.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta:Media Presindo.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. PT. Buku Kita:Jakarta



RIWAYAT HIDUP



ST HAWAH. Dilahirkan Di Ujung Pandang Tepatnya Di Rumah Pada Tanggal 01 Oktober 1997. Anak Ke-12 Dari 13 bersaudara. Anak dari Pasangan Alm. H. Muh. Yusuf Dan Hj. Aisyah. Penulis Awal Mengenal Pendidikan Di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Perumnas Makassar Tahun 2002 dan Selesai Pada Tahun 2008. Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Di SMP Muhammadiyah 12 Makassar Dan Tamat Pada Tahun 2011. Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di MAN 2 Makassar Pada Tahun 2011 Dan Selesai Pada Tahun 2014. Pada Tahun Yang Sama Pula Penulis Melanjutkan Pendidikan Di Perguruan Tinggi Swasta, Tepatnya Di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dan Penulis Menyelesaikan Kuliah Strata Satu (S1) Pada Tahun 2019.

